

**LAPORAN KEUANGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1 Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah selama satu periode pelaporan.

Laporan Keuangan digunakan untuk mengetahui realitas pendapatan dan belanja anggaran yang telah ditetapkan, mengevaluasi efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai suatu entitas akuntansi dan membantu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah sebagai Entitas Pelaporan dalam menyusun Laporan Konsolidasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku entitas akuntansi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur selama satu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggung jawabkan pengelolaan sumberdaya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan antar Generasi

Untuk mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

1.1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik :

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumberdaya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatan dan mencakup kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat yang dilakukan selama periode pelaporan.
- f. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan dan belanja pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai suatu entitas akuntansi yang terdiri dari :

- (a) Laporan Realisasi Anggaran,
- (b) Neraca,
- (c) Laporan Operasional,
- (d) Laporan Perubahan Ekuitas,
- (e) Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumberdaya yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam suatu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pendapatan
- b. Belanja
- c. Transfer
- d. Surplus / Defisit
- e. Pembiayaan
- f. Sisa Lebih / Kurang pembiayaan anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam suatu periode pelaporan.

Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan assetnya dalam asset lancar dan tidak lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Laporan Operasional

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah maka disusunlah Laporan Operasional. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-Laporan Operasional, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Penyusunan Laporan Operasional, Laporan perubahan ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-Laporan Operasional, koreksi dan ekuitas akhir. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan disusun agar laporan keuangan dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya, catatan atas laporan keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- a. Kas dan setara kas
- b. Investasi jangka pendek
- c. Piutang pajak dan bukan pajak
- d. Persediaan
- e. Investasi Jangka Panjang
- f. Aset Tetap
- g. Kewajiban Jangka Pendek
- h. Kewajiban Jangka Panjang
- i. Ekuitas Dana

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca menyajikan :

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal / keuangan, ekonomi makro, pencapaian target undang-undang APBN / Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan

- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan pemerintah Pusat dan Daerah antara lain :

- a. Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 240 ayat 2 bahwa SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan SKPD yang disampaikan kepada PPKD (BPKAD) untuk digabung menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
- b. PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pasal 4 Ayat 1 bahwa Pemerintah Daerah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual,
- c. Permendagri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
- d. Peraturan Gubernur No 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
- e. Peraturan Gubernur No. 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
- f. Surat Edaran Gubernur No 921/0017982 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Pedoman Percepatan Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2016.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan-Catatan Atas Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 921 / 0017982 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016, maka sistematika isi catatan atas Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum

- 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target Kinerja yang Telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Bab V Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan

- 5.1 Penjelasan Pos-pos Neraca
 - 5.1.1 Aset
 - 5.1.2 Kewajiban
 - 5.1.3 Ekuitas Dana
- 5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.2.1 Pendapatan
 - 5.2.2 Belanja
- 5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
 - 5.3.1 Pendapatan
 - 5.3.2 Beban
- 5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

2.1. Ekonomi Makro

Kinerja Perekonomian nasional dari tahun ke tahun yang semakin mantap dan terkendali merupakan indikator positif bagi perkembangan perekonomian nasional selanjutnya.

Perbaikan perekonomian nasional yang telah tercapai ditunjukkan oleh beberapa indikator ekonomi makro dan moneter, antara lain melalui pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, Pendapatan Domestik Bruto (PDB), Cadangan Devisa, Nilai Tukar rupiah, Suku Bunga Bank Indonesia (SBI) dan kinerja ekspor.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ditunjukkan dan diarahkan untuk meningkatkan kualitas potensi wilayah dan pemberdayaan masyarakat dalam tiga bidang utama yaitu bidang ekonomi, bidang sosial budaya pemerintahan dan bidang fisik infrastruktur. Sesuai dengan visi Jawa Tengah yaitu menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”

Bidang ekonomi ditujukan untuk meningkatkan kualitas potensi ekonomi wilayah dalam rangka mendukung program pembangunan yang dilandasi Tri Sakti Bung Karno dan dilaksanakan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfaatkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan berkeadilan.

Bidang sosial budaya dan pemerintahan ditujukan untuk pelaksanaan reformasi birokrasi berbasis kompetensi, pengembangan pola karier yang terbuka, sinkronisasi dan harmonisasi hubungan dan regulasi antara provinsi dan kabupaten/kota, memperkuat sistem pelayanan publik secara cepat, murah, transparan dan terintegrasi; pemantapan kondusivitas wilayah; serta pengembangan demokratisasi dan wawasan kebangsaan.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA). Dengan visi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah “Menjadi Pengelola Manajemen Kepegawaian Yang Profesional dan Unggul”, perlu melakukan penataan diri baik dari segi sistem, personil maupun pelayanannya untuk dapat mewujudkan PNS yang profesional, bermoral, netral serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana amanat undang-undang.

Untuk mewujudkan visi serta memantapkan eksistensi dan arah perjuangan, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah menetapkan misi sebagai berikut :

1. Perencanaan dan pengembangan pegawai yang obyektif dan transparan.
2. Pelaksanaan mutasi kepegawaian yang akurat dan terukur.
3. Peningkatan kualitas pegawai melalui pengukuran kompetensi dan penilaian kinerja.
4. Peningkatan disiplin dan kesejahteraan serta pelaksanaan netralitas pegawai.
5. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian yang akurat dan terintegrasi.
6. Peningkatan tertib administrasi dan layanan prima kepegawaian.

Sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah adalah :

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas aparatur yang berbasis kompetensi;
2. Meningkatnya kinerja aparatur yang akuntabel;
3. Terwujudnya penerapan penghasilan berdasarkan kinerja;
4. Meningkatnya akurasi data sumber daya aparatur melalui pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian;
5. Meningkatnya jaringan sistem informasi kepegawaian lingkup Provinsi Jawa Tengah;
6. Meningkatnya kualitas pelayanan manajemen kepegawaian yang terintegrasi dan terpadu;
7. Meningkatnya moral dan etika PNS dalam bekerja;
8. Menurunnya jumlah kasus kedisiplinan;
9. Meningkatnya kualitas pelayanan pegawai di bidang kesehatan jasmani dan rohani;
10. Meningkatnya produktivitas dan kinerja pegawai.

Guna tercapainya visi misi yang telah ditetapkan maka pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah dijabarkan dalam program-program setiap tahunnya, adapun program – program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2016, yaitu :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Program Penyelenggaraan Kepegawaian Dan Perangkat Daerah

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Sumber pendapatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2016 yaitu dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dengan target Rp 500.100.000,- dengan realisasi sebesar Rp 728.400.000,- atau menunjukkan bahwa pencapaian kinerja pendapatan adalah sebesar 145,65% dari yang ditargetkan, hal ini disebabkan adanya Ujian Kenaikan Tingkat/Kelas dengan anggaran Rp 325.00.000,- dengan realisasi sebesar Rp 553.400.000,- atau sebesar Rp 170,22%. Hal ini karena Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI) pada tahun 2016 dilaksanakan 2 kali pada tahun 2016 yaitu pada bulan Maret dan November dengan demikian peserta fasilitasi Ujian Dinas dan UKPPI juga menjadi bertambah sehingga realisasi pendapatan di tahun 2016 menjadi meningkat (melebihi target).

Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2016 setelah perubahan sebesar Rp 51.483.153.000,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 30.449.461.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp 21.033.692.000,- dengan realisasi sebesar Rp 38.554.707.177,- terdiri dari Belanja tidak langsung sebesar Rp 21.875.824.381,- atau 71,84% dan Belanja langsung sebesar Rp 16.678.882.796,- atau menunjukkan pencapaian kinerja sebesar 79,30% hal ini dikarenakan adanya:

- a. Belanja Tidak Langsung anggaran sebesar Rp 30.449.461.000,- dengan realisasi sebesar Rp 21.875.824.381,- atau 71,84%. Hal ini dikarenakan semula menganggarkan gaji untuk CPNS Formasi tahun 2015 ternyata masih ada moratorium pengadaan CPNS di tahun 2015 dan 2016. Sehingga gaji untuk CPNS tidak terserap.
- b. Belanja Langsung anggaran sebesar Rp 21.033.692.000,- dengan realisasi sebesar Rp 16.678.882.796,- atau 79,30% . Berikut nama kegiatan yang realisasinya kurang dari 96%:
 - Pendidikan dan pelatiba formal anggaran sebesar Rp 370.150.000,- dengan realisasi sebesar Rp 147.409.400,- atau sebesar 39,82%,- karena Pelaksanaan Outbond Manajemen Training bagi PNS BKD Prov Jateng tidak dilaksanakan sesuai dengan surat Edaran Gubernur Jateng No. 903/0016730 tanggal 30 September 2016.
 - Pengadaan CPNSD Pem.Prov.Jateng dan Seleksi Pengadaan CPNSD Kab/Kota dengan anggaran sebesar Rp 84.830.000,- realisasi sebesar Rp 5.529.500,- atau 6,52 % karena Adanya Moratorium Pengadaan CPNSD Tahun 2016.
 - Pemetaan PNS Potensial untuk Menduduki Jabatan Struktural di Lingkungan Pem.Prov Jateng dengan anggaran sebesar Rp 1.796.200.000,- realisasi sebesar Rp 1.213.912.600,- atau sebesar Rp 67,58% karena Sebelum dilaksanakannya mutasi JPT, sudah diterbitkan PP 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
 - Seleksi calon praja IPDN dan pembinaan praja IPDN dengan anggaran sebesar Rp 676.731.000 realisasi Rp 455.146.060 atau sebesar Rp 67,26% karena Pengganti uang transport PP Praja IPDN di kampus Regional tidak diberikan karena setiap tahun berubah penempatan kampusnya
 - Ujian kedinasan PNS Pem.Prov. Jateng dan fasilitasi ujian kedinasan PNS Kab/Kota/BUMD dan instansi lainnya anggaran Rp 415.422.000 realisasi Rp 290.639.850 atau 67,26% karena 1. Biaya cetak soal LJK tidak dapat terserap karena

Ujian Dinas dan UKPPI menggunakan TMMK (Tes Menggunakan Media Komputer),
 2. Biaya sewa gedung tidak terserap karena Ujian Dinas dan UKPPI tidak di GOR.,
 3. Pada Tengah tahun anggaran, sarana komputer TMK sudah siap sehingga sistem ujian dirubah menggunakan TMMK

- Tes kompetensi pejabat struktural Pem.Prov.Jateng dan Pejabat Pem. Kab/Kota anggaran Rp 909.486.000 realisasi Rp 289.059.399 atau 31,78% karena Terkait UU Pilkada No. 8 Tahun 2015, Kepala Daerah tidak diperbolehkan melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum dan setelah dilantik.
- Evaluasi Kinerja pejabat fungsional anggaran Rp 46.824.000 realisasi Rp 45.789.000 atau 97,79% karena Satu Kegiatan Evaluasi tidak dapat dilaksanakan.
- Tugas Belajar dan Ijin Belajar PNS Pemprov Jateng anggaran sebesar Rp 2.967.258.000 realisasi Rp 1,671.902.592 atau 56,35% karena 1. Target tugas belajar S2 = 13 PNS hanya terealisasi 10 PNS., 2. Target Tugas belajar s3=9 PNS hanya terealisasi 8 PNS., 3. Tunjangan belajar tidak diberikan kepada PNS yang TB karena dalam Pergubnya tidak diatur.
- Penataan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas anggaran Rp 695.188.000 realisasi Rp 662.893.429 atau 95,35% karena Dengan terbitnya PP 18 Tahun 2016, untuk efisiensi penataan personil menunggu perda OPD baru.

3.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Hambatan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditetapkan, yakni adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

Dalam menghadapi permasalahan tersebut, strategi yang dilaksanakan yaitu Mengevaluasi kembali target-target pencapaian kegiatan dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah guna mengantisipasi adanya kebijakan yang berdampak pada pencapaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

No.	Kode Rekening	Nama Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	Persentase Keuangan	Realisasi Fisik	Keterangan
			(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	
	1.20.1.20.11.01.00.00	Belanja Tidak Langsung	30.449.461.000	21.875.824.381			
	1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	12.421.569.000	9.653.875.779	77,71	100,00	
	2	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	18.027.892.000	12.221.948.602	67,79	100,00	

		Belanja Langsung					
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.789.839.000	4.185.531.732			
1	1.20.1.20.11.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	35.200.000	35.198.000	99,99	100,00	
2	1.20.1.20.11.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	773.520.000	577.556.542	74,67	100,00	Efisiensi
3	1.20.1.20.11.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	183.515.000	164.950.000	89,88	100,00	Efisiensi
4	1.20.1.20.11.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	90.750.000	88.715.000	97,76	100,00	
5	1.20.1.20.11.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	902.000.000	789.571.650	87,54	100,00	Efisiensi
6	1.20.1.20.11.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	616.000.000	474.676.000	77,06	100,00	Efisiensi
7	1.20.1.20.11.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	31.900.000	31.641.300	99,19	100,00	
8	1.20.1.20.11.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	47.300.000	46.448.500	98,20	100,00	
9	1.20.1.20.11.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	16.500.000	16.500.000	100,00	100,00	
10	1.20.1.20.11.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	220.000.000	219.892.791	99,95	100,00	
11	1.20.1.20.11.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	829.557.000	829.552.949	100,00	100,00	
12	1.20.1.20.11.01.19	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	1.043.597.000	910.829.000	87,28	96,93	Efisiensi
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.292.046.000	3.151.241.394	95,72	100,00	
13	1.20.1.20.11.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1.056.100.000	1.043.319.100	98,79	100,00	
14	1.20.1.20.11.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	616.000.000	586.849.394	95,27	100,00	Efisiensi
15	1.20.1.20.11.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	99.000.000	98.973.500	99,97	100,00	
16	1.20.1.20.11.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	14.300.000	14.272.500	99,81	100,00	
17	1.20.1.20.11.02.46	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	320.097.000	299.572.800	93,59	100,00	Efisiensi

18	1.20.1.20.11.02.55	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	1.186.549.000	1.108.254.100	93,40	100,00	Efisiensi
		Program peningkatan disiplin aparatur	112.480.000	102.530.000	91,15	100,00	
19	1.20.1.20.11.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	112.480.000	102.530.000	91,15	100,00	Efisiensi
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	370.150.000	147.409.400	39,82	54,00	
20	1.20.1.20.11.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	370.150.000	147.409.400	39,82	54,00	Pelaksanaan Outbond Manajemen Training bagi PNS BKD Prov Jateng tidak dilaksanakan sesuai dengan surat Edaran Gubernur Jateng No. 903/0016730 tanggal 30 September 2016
		Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah	12.469.177.100	9.092.170.270			
21	1.20.1.20.11.31.26	Kegiatan Pengembangan Layanan Informasi Administrasi Kepegawaian serta sinkronisasi kebijakan bidang kepegawaian di Jateng	167.500.000	164.495.000	98,21	100,00	
22	1.20.1.20.11.31.04	Kegiatan Penyusunan DSP dan Formasi PNS	221.465.000	219.796.350	99,25	100,00	
23	1.20.1.20.11.31.05	Kegiatan Pengadaan CPNSD Pem.Prov.Jateng dan Seleksi Pengadaan CPNSD Kab/Kota	84.830.000	5.529.500	6,52	7,07	Adanya Moratorium Pengadaan CPNSD Tahun 2016
24	1.20.1.20.11.31.07	Kegiatan Penataan PNS dalam Jabatan Fungsional Khusus	166.580.000	152.739.950	91,69	100,00	
25	1.20.1.20.11.31.08	Kegiatan Pemetaan PNS Potensial untuk Menduduki Jabatan Struktural di Lingkungan Pem.Prov Jateng	1.796.200.000	1.213.912.600	67,58	84,46	Sebelum dilaksanakannya mutasi JPT, sudah diterbitkan PP 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah
26	1.20.1.20.11.31.11	Kegiatan Seleksi calon praja IPDN dan pembinaan praja IPDN	676.731.000	455.146.060	67,26	94,27	Pengganti uang transport PP Praja IPDN di kampus Regional tidak diberikan karena setiap tahun berubah penempatan kampusnya
27	1.20.1.20.11.31.12	Kegiatan Ujian kedinasan PNS Pem.Prov. Jateng dan fasilitasi ujian kedinasan PNS Kab/Kota/BUMD dan instansi lainnya	415.422.000	290.639.850	69,96	87,28	1. Biaya cetak soal LJK tidak dapat terserap karena Ujian Dinas dan UKPPI menggunakan TMMK (Tes Menggunakan Media Komputer).., 2.Biaya sewa gedung tidak terserap karena Ujian Dinas dan UKPPI tidak di GOR., 3. Pada Tengah tahun anggaran, sarana komputer TMK sudah siap sehingga sistem ujian dirubah menggunakan TMMK
28	1.20.1.20.11.31.13	Kegiatan Tes kompetensi pejabat struktural Pem.Prov.Jateng dan Pejabat Pem. Kab/Kota	909.486.000	289.059.399	31,78	94,65	Terkait UU Pilkada No. 8 Tahun 2015, Kepala Daerah tidak diperbolehkan melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum dan setelah dilantik.

29	1.20.1.20.11.31.15	Kegiatan Evaluasi Kinerja pejabat fungsional	46.824.000	45.789.000	97,79	98,72	Satu Kegiatan Evaluasi tidak dapat dilaksanakan
30	1.20.1.20.11.31.37	Kegiatan Tugas Belajar dan Ijin Belajar PNS Pemprov Jateng	2.967.258.000	1.671.902.592	56,35	91,70	1. Target tugas belajar S2 = 13 PNS hanya terealisasi 10 PNS., 2. Target Tugas belajar s3=9 PNS hanya terealisasi 8 PNS., 3. Tunjangan belajar tidak diberikan kepada PNS yang TB karena dalam Pergubnya tidak diatur.
31	1.20.1.20.11.31.41	Kegiatan Penataan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas	695.188.000	662.893.429	95,35	97,61	Dengan terbitnya PP 18 Tahun 2016, untuk efisiensi penataan personil menunggu perda OPD baru
32	1.20.1.20.11.31.43	Perumusan Konsep Pola Karir PNS	169.290.000	140.539.150	83,02	100,00	
33	1.20.1.20.11.31.09	Kegiatan Pengangkatan CPNS dan Fasilitas Kenaikan Pangkat PNS	910.940.000	701.310.180	76,99	100,00	
34	1.20.1.20.11.31.10	Kegiatan Mutasi dan pensiun PNS	354.949.100	353.547.717	99,61	100,00	
35	1.20.1.20.11.31.40	Evaluasi Penempatan PNS dalam Jabatan Fungsional Umum	148.512.000	146.185.323	98,43	100,00	
36	1.20.1.20.11.31.16	Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan kepegawaian	71.700.000	60.941.800	85,00	100,00	
37	1.20.1.20.11.31.17	Kegiatan Layanan administrasi kepegawaian	109.522.000	82.720.600	75,53	100,00	
38	1.20.1.20.11.31.20	Kegiatan Penganugrahan tanda jasa kepada PNS Pem.Prov. Jateng dan PNS Kab/Kota	186.923.000	165.622.765	88,60	100,00	
39	1.20.1.20.11.31.21	Kegiatan Pembekalan bagi PNS Pem. Prov. Jateng yang akan purna tugas	631.325.000	603.752.000	95,63	100,00	
40	1.20.1.20.11.31.22	Kegiatan Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNS	345.102.000	335.986.680	97,36	100,00	
41	1.20.1.20.11.31.23	Kegiatan Pengelolaan pusat kebugaran PNS	19.800.000	18.800.000	94,95	100,00	
42	1.20.1.20.11.31.28	Kegiatan Pembinaan kesejahteraan PNS perempuan Prov.Jateng	96.117.000	88.562.230	92,14	100,00	
43	1.20.1.20.11.31.29	Kegiatan Bintek Pembinaan PNS	182.641.000	170.826.400	93,53	100,00	
44	1.20.1.20.11.31.24	Kegiatan Pengembangan sistem informasi data kepegawaian	323.439.000	302.477.404	93,52	99,29	
45	1.20.1.20.11.31.25	Kegiatan Pengelolaan data tata naskah kepegawaian	310.605.000	301.964.730	97,22	100,00	

46	1.20.1.20.11.31.27	Kegiatan Pengembangan aplikasi simpeg pada SKPD Pem.Prov.Jateng	193.837.000	187.297.628	96,63	100,00	
47	1.20.1.20.11.31.35	Pengembangan Portal Kepegawaian PNS se Jawa Tengah	102.228.000	98.893.166	96,74	100,00	
48	1.20.1.20.11.31.36	Kegiatan Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK-BKN)	164.763.000	160.838.767	97,62	100,00	
* Jumlah/Rata-rata			21.033.692.100	16.678.882.796			

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Akuntansi yang dimaksud dalam Laporan Keuangan ini adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang merupakan bagian dari entitas pelaporan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah, khususnya pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa Penerapan SAP berbasis akrual pada Pemerintah Daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah maka Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 disusun disajikan secara akrual. Basis Akrual adalah adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Untuk melengkapi Laporan Keuangan menjadi berbasis akrual maka dibuat Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Operasional (LO) yang menyajikan informasi seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercermin dalam pendapatan, beban, dan surplus/defisit. Sedangkan Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi perubahan ekuitas dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi, dan ekuitas akhir.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah meliputi:

- 1) Kas di kas daerah
- 2) Kas di Bendahara Penerimaan
- 3) Kas di Bendahara Pengeluaran
- 4) Tanah
- 5) Peralatan dan Mesin
- 6) Gedung dan Bangunan
- 7) Asset Tetap Lainnya
- 8) Pendapatan
- 9) Belanja

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam pelaporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Selain itu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah dan Peraturan

Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan

Pendapatan yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan pendapatan yang bersifat in-out. Terdiri dari penerimaan fasilitas sosial dan fasilitas umum, Uang sekolah/ Pendidikan dan Pelatihan, dan uang ujian kenaikan tingkat/kelas.

5.1.1.1. Pendapatan Daerah

Total realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 735.300.000,00 atau 147,03 % dari target Rp 500.100.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2015 realisasi sebesar 683.984.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2016		%	Realisasi 2015
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Asli daerah				
Pendapatan Transfer				
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	500.100.000	735.300.000	147,03	683.984.000
Jumlah	500.100.000	735.300.000	147,03	683.984.000

5.1.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 735.300.000,00 atau 147,03% dari target Rp 500.100.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar 683.984.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2016		%	Realisasi 2015
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Pajak Daerah				
Pendapatan Retribusi Daerah				
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	500.100.000	735.300.000	147,03	683.984.000
Jumlah	500.100.000	735.300.000	147,03	683.984.000

5.1.1.1.1.1. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 735.300.000,00 atau 147,03 % dari target 500.100.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar 683.984.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2016	%	Realisasi 2015

	Anggaran	Realisasi		
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan				
Tuntutan Ganti Rugi				
Pendapatan Denda keterlambatan				
Pendapatan Denda Pajak				
Pendapatan Denda Retribusi				
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda				
Pendapatan dari Pengembalian				
Penerimaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	0	0		125.984.000
Penerimaan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	500.100.000	735.300.000	147,03	558.000.000
Penerimaan dari BLUD				
Penerimaan Lain-Lain				
Jumlah	500.100.000	735.300.000	147,03	683.984.000

5.1.2. PENJELASAN POS-POS BELANJA

Belanja yang dimasukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah realisasi belanja berdasarkan SPJ belanja bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2016. (Semua Objek Belanja Yang Tidak Dapat Terealisasi < 96% Dijelaskan Secara Rinci di dalam Laporan Realisasi Anggaran)

5.1.2.1. BELANJA OPERASI

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 37.446.453.077,- atau 74,45 % dari anggaran dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 51.686.010.259,- dengan rincian sebagai berikut :

	2016		%	Realisasi 2015
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai	33.266.536.000,-	24.060.516.881,-	72,33	36.664.656.839,-
Belanja Barang & Jasa	17.030.068.000,-	13.385.936.196,-	78,60	15.021.353.420,-
Jumlah	50.296.604.000,-	37.446.453.077,-	74,45	51.686.010.259,-

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

.Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar 24.060.516.881,- atau 72,33% dari anggaran Rp 33.266.536.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 36.664.656.839,- dengan rincian sebagai berikut :

	2016		%	Realisasi 2015
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai Tidak Langsung	30.449.461.000,00	21.875.824.381,00	72,73	34.200.420.039
Belanja Pegawai langsung	2.817.075.000,00	2.184.692.500,00	77,55	2.464.236.800
Jumlah	36.083.611.000,00	26.245.209.381,00	72,73	36.664.656.839

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 13.385.936.196,- atau 78,6% dari anggaran Rp 17.030.068.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp15.021.353.420 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2016			2015
	Anggaran	Realisasi	%	
Belanja Bahan Pakai Habis	2.082.317.000	1.845.278.193	89	1.603.470.575
Belanja Bahan/Material	191.249.000	188.988.600	99	82.841.000
Belanja Jasa Kantor	1.193.470.000	859.931.542	72	1.167.028.265
Belanja Premi Asuransi	106.322.000	100.469.000	94	84.235.460
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	253.000.000	245.014.351	97	470.288.791
Belanja Cetak dan Penggandaan	1.051.926.000	807.910.200	77	971.070.170
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.397.320.000	1.197.151.000	86	1.745.162.440
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	93.820.000	91.000.000	97	51.400.000
Belanja Sewa Alat Berat	-	-	-	-
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	141.810.000	137.340.000	97	113.544.000
Belanja Makanan dan Minuman	989.345.000	750.182.241	76	732.571.048
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	112.480.000	102.530.000	91	24.425.000
Belanja Pakaian Kerja Lapangan	-	-	-	-
Belanja Pakaian Kerja	-	-	-	-
Belanja Pakaian Khusus dan Hari Teretntu	-	-	-	94.000.000
Belanja Perjalanan Dinas	4.661.562.000	3.759.608.669	81	3.640.119.149
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	2.829.250.000	1.572.350.000	56	809.151.650
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	215.000.000	64.424.500	30	448.250.282
Belanja Pemeliharaan	1.343.007.000	1.317.667.900	98	2.522.510.590
Belanja Jasa Konsultansi	368.190.000	346.090.000	94	461.285.000
Belanja Pengadaan Jasa Lainnya	-	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	-	-	-	-
Belanja Hibah Barang yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masy	-	-	-	-
Belanja Hadiah Uang	-	-	-	-
Belanja Hadiah Barang	-	-	-	-

Belanja Publikasi	-	-	-	-
Belanja Barang dan Jasa BLUD	-	-	-	-
Total	17.030.068.000	13.385.936.196	78,6	15.021.353.420

5.1.2.1.3. Belanja Modal

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 1.108.254.100,- atau 93,4 % dari anggaran Rp 1.186.549.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar dengan rincian sebagai berikut :

	2016		%	Realisasi 2015
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Tanah				
Belanja Peralatan dan Mesin	1.003.749.000	946.655.600	94,31	2.246.364.100
Belanja Gedung dan Bangunan				
Belanja Jalan, Jembatan, irigasi dan Jaringan				
Belanja Aset Tetap Lainnya	182.800.000	161.598.500	88,4	3.174.100
Jumlah	1.186.549.000	1.108.254.100	93,4	2.249.538.200

5.1.2.1.3.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 946.655.600,- atau 94,31 % dari anggaran Rp 1.003.749.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 2.246.364.100,- dengan rincian sebagai berikut :

	2016		%	Realisasi 2015
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Alat-alat Berat				
Belanja Alat-alat Angkut				487.780.000
Belanja Alat-alat Bengkel				
Belanja Alat-alat Pertanian				
Belanja Alat-alat Kantor dan rumah Tangga	266.200.000	254.677.600	95,67	958.980.000
Belanja Alat-alat Studio	166.346.000	151.190.000	90,89	11.656.000
Belanja Alat-alat Kedokteran				
Belanja Alat-alat Laboratorium				
Belanja Alat-alat Keamanan	24.400.000	23.800.000	97,54	
Komputer	336.803.000	317.725.000	94,34	746.224.000
Meja dan Kursi	210.000.000	199.263.000	94,89	41.550.000
Jumlah	1.186.549.000	1.108.254.100	93,40	2.243.190.000

5.1.2.1.3.2. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 161.598.500,- atau 88,40.% dari anggaran Rp 182.800.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 3.174.100,- dengan rincian sebagai berikut :

	2016		%	2015
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Buku Perpustakaan	3.000.000	2.898.500	96,62	3.174.100
Belanja Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	179.800.000	158.700.000	88,26	
Belanja Hewan, Ternak dan Tanaman				
Jumlah	182.800.000	161.598.500	88,40	3.174.100

5.1.3. SISA LEBIH PEMBIYAAAN ANGGARAN (SiLPA)

SiLPA Tahun Anggaran 2016 sebesar (Rp 37.819.407.177,-) sedangkan Tahun 2015 sebesar (Rp53.248.390.359).

5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1. Aset

Total Aset per 31 Desember 2016 sebesar Rp 14.972.512.654,81,-turun sebesar Rp 189.546.589,6 atau 1,25% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 15.162.059.244,43.

5.2.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2016 sebesar Rp 367.746.750,- naik sebesar Rp 90.316.520,- atau 32,55 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 277.430.230,-.

5.2.1.1.1. Kas

Kas per 31 Desember 2016 sebesar Rp 480,- naik sebesar Rp 480,- dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 0,- dengan rincian sebagai berikut :

	2016	2015
Kas di Bendahara Pengeluaran	480	0
Kas di Bendahara Penerimaan		
Kas BLUD		
Jumlah	480	0

5.2.1.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

a. Kas di Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor

Kas di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor merupakan sisa tambahan uang persediaan bendahara pengeluaran pembantu pada Bidang Umum Kepegawaian yang belum diambil dan masih di rekening bank yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 belum diambil oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Umum Kepegawaian dan merupakan bagian dari non SiLPA Tahun 2016. Hal ini merupakan uang untuk membayar sisa hutang pada pihak ketiga.

	URAIAN	2016	2015
1	Rekening Bank Bendahara Pengeluaran Pembantu	480	0
	Jumlah	480	0

Rekening Bank tersebut tahun 2017 telah diambil oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Umum Kepegawaian dan sudah digunakan untuk membayar hutang ke pihak ketiga :

NO	URAIAN	Nilai	Diambil
1	Rekening Bank Bendahara Pengeluaran Pembantu	480	480
	Jumlah	480	480

5.2.1.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

a. Kas di Bendahara Penerimaan-SKPD

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas pada Bendahara Penerimaan SKPD (baik yang ada di rekening bank maupun brankas) yang berasal dari pendapatan retribusi, lain-lain PAD yang sah dan jasa giro bendahara yang belum disetor ke rekening kas umum daerah per 31 Desember 2016.

NO	URAIAN	2016	2015
1	-	0	0
2	-	0	0
	Jumlah	0	0

5.2.1.1.2. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional SKPD, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan diperoleh dari hasil perhitungan fisik per 31 Desember 2016, dikalikan dengan harga pembelian terakhir. Persediaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp 367.746.750,00 naik/turun sebesar Rp 90.316.520,00 atau 24,56.% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 277.430.230,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2016	2015
Persediaan Bahan Pakai Habis	151.742.750	108.533.730
Persediaan Bahan/Material		
Persediaan Cetak	216.004.0000	168.896.500
Persediaan Pakaian Dinas/Kerja		
Persediaan Makanan dan Minuman		

Persediaan Hibah		
Jumlah	367.746.750	277.430.230

Persediaan Barang Pakai Habis Alat Tulis Kantor

No.	Nama Barang	Vol.	Harga Satuan	Saldo Akhir
1	Amplop PUTIH besar	-	25.000	-
2	Amplop PUTIH besar	4	14.300	57.200
3	Amplop PUTIH KECIL	-	13.000	-
4	Amplop PUTIH KECIL	4	6.600	26.400
5	Amplop PUTIH tanggung	-	21.500	-
6	Amplop PUTIH tanggung	1	12.100	12.100
7	Ballpoint BOLLINER hitam, PILOT	-	24.200	-
8	BOXI	-	9.000	-
9	Ballpoint Faster Merah	133	4.400	585.200
10	Ballpoint Faster hitam	60	4.400	264.000
11	Ballpoint Pantel	17	57.000	969.000
12	Ballpoint Drawing Pen 0,5 mm	72	12.650	910.800
13	Ballpoint Gel ink pen black 1,0 mm	120	11.500	1.380.000
14	Bantalan Stempel	-	11.000	-
15	Bantalan Stempel	25	8.250	206.250
16	Bantalan Stempel	25	28.050	701.250
17	Bantalan penghitung uang	-	4.000	-
18	Bantalan penghitung uang	29	5.000	145.000
19	Bantalan penghitung uang	13	7.200	93.600
20	Batubaterai Besar ABC	-	12.100	-
21	Batubaterai Besar ABC	-	13.000	-
22	Batubaterai kecil ABC	-	9.350	-
23	Batu baterai REMOTE A3 ALKALIN	9	10.300	92.700
24	Batu baterai REMOTE A2 ALKALIN	37	10.300	381.100
25	Batu Baterai kotak 9V	-	38.500	-
26	Batu Baterai kotak 9V	21	42.300	888.300
27	Binder Clips	134	27.500	3.685.000
28	Box File	-	22.000	-
29	Box File	52	24.850	1.292.200
30	Buku Expedisi isi 100	71	22.000	1.562.000
31	Buku Tulis Folio isi 100	-	9.350	-
32	Buku Tulis Folio isi 100	75	17.000	1.275.000
33	Buku Tulis Folio isi 200	19	38.500	731.500
34	Buku Tulis kwarto isi 200	33	17.600	580.800
35	Buku Tulis kwarto isi 200	30	22.500	675.000
36	Buku Tulis Kwarto isi 100	47	9.350	439.450
37	Buku Tulis Kwarto isi 100	100	15.000	1.500.000
38	Buku Tulis isi 38	81	3.500	283.500
39	Buku Tulis isi 38	100	4.000	400.000
40	CD-RW	-	9.000	-

41	CD-RW	14	10.000	140.000
42	CD-R	15	4.000	60.000
43	CD-DVD	14	10.500	147.000
44	CALCULATOR	28	121.000	3.388.000
45	CALCULATOR	40	100.000	4.000.000
46	Cutter kecil	-	7.500	-
47	Cutter kecil	21	8.500	178.500
48	Cutter besar	1	22.000	22.000
49	Cutter besar	50	28.000	1.400.000
50	Disket 2 HD FUJI	30	5.000	150.000
51	Data Print (DP 27)	49	27.000	1.323.000
52	Data Print (DP.28)	54	27.000	1.458.000
53	Flash Disk	12	85.000	1.020.000
54	Gunting	-	14.300	-
55	Gunting	36	19.000	684.000
56	Isi ballpoint PENTEL	-	19.250	-
57	Isi ballpoint PENTEL	66	30.000	1.980.000
58	Isi Cutter kecil	81	4.500	364.500
59	Isi Cutter kecil	10	8.500	85.000
60	Isi Cutter kecil	10	6.600	66.000
61	Isi Cutter besar	-	19.000	-
62	Isi Cutter besar	-	14.000	-
63	Isi Staples besar	-	2.200	-
64	Isi Staples besar	263	2.300	604.900
65	Isi Staples kecil	-	1.800	-
66	Isolasi PANFIK besar dan Kecil	-	12.650	-
67	Isolasi PANFIK besar dan Kecil	31	17.000	527.000
68	Karbon Double Folio Daito	18	100.000	1.800.000
69	Karbon Double Folio Daito	3	85.900	257.700
70	Karbon Double Folio Daito	2	78.100	156.200
71	Karbon Double Folio Daito	2	110.000	220.000
72	Karbon Folio	2	35.000	70.000
73	Karbon Folio	10	42.000	420.000
74	Karbon Folio	2	50.000	100.000
75	Karet Gelang	-	27.500	-
76	Karet Gelang	10	42.000	420.000
77	Kertas continouse form 1ply 9,5 x 11"	-	176.000	-
78	Kertas continouse form 1ply 9,5 x 11"	3	181.000	543.000
79	Kertas continouse form 1ply 9,5 x 11"	10	185.000	1.850.000
80	Kertas continouse form 1ply 14 7/8 x 11"	-	240.000	-
81	Kertas continouse form 1ply 14 7/8 x 11"	-	243.000	-
82	Kertas continouse form 1ply 14 7/8 x 11"	3	270.000	810.000
83	Kertas continouse form 1ply 14 7/8 x 11"	5	262.000	1.310.000
84	Kertas continouse form 2ply 9,5 x 11"	-	205.280	-
85	Kertas continouse form 2ply 9,5 x 11"	4	180.000	720.000
86	Kertas continouse form 2ply 14 7/8 x 11"	-	275.000	-
87	Kertas continouse form 2ply 14 7/8 x 11"	-	350.000	-

88	Kertas continouse form 2ply 14 7/8 x 11"	5	368.000	1.840.000
89	Kertas continouse form 2ply 14 7/8 x 11"	5	380.000	1.900.000
90	Kertas continouse form 4 ply 14, 7/8 x 11" (GAJI)	-	600.000	-
91	Kertas FAX	23	35.000	805.000
92	Kertas HVS DF BERGARIS	32	42.000	1.344.000
93	Kertas HVS double FOLIO 70 gr	-	73.800	-
94	Kertas HVS double FOLIO 70 gr	21	74.000	1.554.000
95	Kertas HVS Folio 70 gram	-	44.000	-
96	Kertas HVS Folio 70 gram	94	46.000	4.324.000
97	Kertas HVS Folio JAMBON	-	44.000	-
98	Kertas HVS Folio JAMBON	5	46.000	230.000
99	Kertas HVS Folio BIRU	-	44.000	-
100	Kertas HVS Folio BIRU	3	46.000	138.000
101	Kertas HVS Folio KUNING	-	44.000	-
102	Kertas HVS Folio KUNING	4	46.000	184.000
103	Kertas HVS Folio HIJAU	-	44.000	-
104	Kertas HVS Folio HIJAU	6	46.000	276.000
105	Kertas HVS kwarto 80 gr	-	45.000	-
106	Kertas HVS kwarto 80 gr	-	47.000	-
107	Klip besar	-	6.000	-
108	Klip besar	88	9.000	792.000
109	Klip Kecil	-	3.000	-
110	Klip Kecil	14	5.400	75.600
111	Kwitansi Panjang	114	14.000	1.596.000
112	Lak ban coklat	10	8.200	82.000
113	Lakban hitam	-	8.200	-
114	Lem kertas	-	7.700	-
115	Lem kertas	16	12.500	200.000
116	Odner FOLIO	-	19.000	-
117	Odner FOLIO	-	42.500	-
118	Pembolong 40 XL-KENKO	-	90.000	-
119	Pembolong 40 XL-KENKO	26	50.000	1.300.000
120	Pembolong 40 XL-KENKO	50	44.550	2.227.500
121				-
122	Pembolong 40 XL-KENKO	30	88.550	2.656.500
123	Penggaris Plastik 30 cm	14	7.000	98.000
124	Penggaris 40 cm / AMC	72	10.000	720.000
125	Penggaris 40 cm / AMC	100	5.900	590.000
126	Penggaris 40 cm / AMC	100	6.000	600.000
127	Penghapus Black Board/Papan Tulis	-	8.700	-
128	Penghapus Black Board/Papan Tulis	12	7.800	93.600
129	Penghapus Black Board/Papan Tulis	30	11.000	330.000
130	Pensil 2B	-	5.000	-
131	Pensil 2B	61	4.000	244.000
132	Pines	5	25.300	126.500
133	Pita Epson LX - 300	3	80.000	240.000
134	Pita Epson LX - 300	10	84.000	840.000

135	Pita Epson LX - 310	2	80.000	160.000
136	Pita Epson LX - 310	10	84.000	840.000
137	Pita Catridge Compuprint PRKN 102	12	820.000	9.840.000
138	Pita mesin ketik hitam, DAITO	-	16.500	-
139	Pita mesin ketik hitam, DAITO	42	18.300	768.600
140	Pita mesin ketik hitam, DAITO	50	33.000	1.650.000
141	Pita Printer LQ 2170/2180	3	185.000	555.000
142	Pita Printer LQ 2170/2180	15	150.000	2.250.000
143	Plastik Transparan 21,5x33cm / YASHICA	1	20.100	20.100
144	Portaple / Map bertali	-	4.800	-
145	Portaple / Map bertali	-	5.500	-
146	Portaple / Map bertali	45	6.000	270.000
147	Remover RZA, MAX	-	23.000	-
148	Remover RZA, MAX	-	33.000	-
149	Remover RZA, MAX	30	50.000	1.500.000
150	Refil Toner Laserjet 12 A + drum	-	345.000	-
151	Refil Toner Laserjet 1300/ 13A + drum	1	345.000	345.000
152	Refil Toner Laserjet 29 X + drum	-	560.000	-
153	Refil Toner Laserjet T 1006 CB.435 A + drum	6	345.000	2.070.000
154	Refil Toner Laserjet CB.436 A + drum	-	345.000	-
155	Refil Toner Laserjet 1160 (49 A) + drum	-	311.300	-
156	Refil Toner Laserjet 1160 (49 A) + drum	-	345.000	-
157	Refil Toner Laserjet Q 7553A + drum	2	345.000	690.000
158	Refil Toner Laserjet HP. 78A + drum	-	345.000	-
159	Refil Toner Laserjet HP. 85A + drum	-	345.000	-
160	Refil Toner Laserjet 2100 / 96A + drum	-	350.000	-
161	Refil Tinta Epson ber ID botol 60 ml Black	10	120.000	1.200.000
162	Refil Tinta Epson ber ID botol 60 ml Yellow	8	120.000	960.000
163	Refil Tinta Epson ber ID botol 60 ml Cyan	8	120.000	960.000
164	Refil Tinta Epson ber ID botol 60 ml Magenta	8	120.000	960.000
165	Sampul coklat	780	550	429.000
166	Setip Ballpoint / PELIKAN	154	3.200	492.800
167	Setip Ballpoint / PELIKAN	100	3.500	350.000
168	Setip Ballpoint / PELIKAN	100	4.100	410.000
169	Setip Ballpoint / PELIKAN	100	4.000	400.000
170	Snelheakter / Stopmap PLASTIK	5	19.000	95.000
171	Snelekter kertas	-	2.800	-
172	Snelekter kertas	2.300	4.000	9.200.000
173	Stop map kertas	-	1.650	-
174	Stop map kertas	700	2.000	1.400.000
175	Spidol besar white board marker hitam	58	11.000	638.000
176	Spidol kecil warna hitam, biru & merah	-	2.000	-
177	Spidol kecil warna hitam, biru & merah	102	2.500	255.000
178	Spidol MARKER besar hitam	-	8.250	-
179	Spidol MARKER besar hitam	80	12.650	1.012.000
180	Stabilo/Boss	76	11.000	836.000
181	Stabilo/Boss	270	14.000	3.780.000

182	Stapler / staples HD-10 Kecil	-	7.000	-
183	Stapler / staples HD-10 Kecil	102	7.700	785.400
184	Stapler / staples HD-50 Besar	-	11.000	-
185	Stapler / staples HD-50 Besar	53	33.000	1.749.000
186	Stip pencil, STEADLER	-	2.500	-
187	Stip pencil, STEADLER	-	3.850	-
188	Stip pencil, STEADLER	87	5.000	435.000
189	Tali Rafia besar	-	22.500	-
190	Tali Rafia besar	9	25.000	225.000
191	Tinta Hp INKJET C.9351A Black 21	-	250.000	-
192	Tinta Hp INKJET C.9351A Black 21	12	295.000	3.540.000
193	Tinta Hp INKJET C.9352 Colour 22	9	370.000	3.330.000
194	Tinta HP INKJET 3326 / 27	-	280.500	-
195	Tinta HP INKJET 3325 / 28	-	300.000	-
196	Toner Laserjet HP 29 X	-	1.439.000	-
197	Toner Laserjet HP 29 X	-	1.700.000	-
198	Toner Printer HP Laserjet T 1006 CB.435 A	-	1.045.000	-
199	Toner Printer HP Laserjet T 1006 CB.435 A	1	1.100.000	1.100.000
200	Toner Printer HP Laserjet CB. 436A (36A)	1	1.200.000	1.200.000
201	Toner Printer HP Laserjet 6 L, 06 F	-	1.045.000	-
202	Toner Printer HP Laserjet 1010 Q.2612.A - (12A)	-	1.200.000	-
203	Toner Printer HP Laserjet 1010 Q.2612.A - (12A)	-	1.250.000	-
204	Toner Printer HP Laserjet 1300 Q.2613.A - (13A)	-	1.450.000	-
205	Toner Printer HP Laserjet 1300 Q.2613.A - (13A)	7	1.400.000	9.800.000
206	Toner Printer HP Laserjet 1160 Q.5949.A - (49A)	7	1.450.000	10.150.000
207	Toner Printer HP Laserjet P.2015 Q.7553.A - (53A)	-	1.450.000	-
208	Toner Printer HP Laserjet CE 278A - (78A)	-	1.200.000	-
209	Toner Printer HP Laserjet CE 285A - (85A)	-	1.100.000	-
210	Toner printer HP laserjet 2100 C.4096.A - (96A)	-	1.150.000	-
211	Tinta nomerator warna UNGU, LION	28	10.000	280.000
212	Tinta nomerator warna UNGU, LION	51	11.000	561.000
213	Tinta nomerator warna UNGU, LION	70	12.700	889.000
214	Tinta nomerator warna UNGU, zenith	70	18.000	1.260.000
215	Tinta nomerator warna HITAM	3	11.000	33.000
216	Tinta nomerator warna HITAM	10	12.700	127.000
217	Tinta nomerator warna HITAM zenith	10	18.000	180.000
218	Tip Ex	8	12.000	96.000
219	Tip Ex	77	11.000	847.000
				151.742.750

Persediaan Barang Pakai Habis Cetak

No.	Nama Barang	Vol.	Harga Satuan	Saldo Akhir
1	Amplop BKD Besar	600	2.750	1.650.000
2	Amplop BKD Besar	10.000	2.800	28.000.000
3	Amplop BKD Besar Berkantong	300	3.000	900.000
4	Amplop BKD Besar Berkantong	1.000	3.200	3.200.000

5	Amplop BKD Kecil	3.200	1.700	5.440.000
6	Amplop BKD Kecil berkantong	1.000	1.925	1.925.000
7	Amplop BKD Kecil berkantong	2.000	2.000	4.000.000
8	Amplop BKD Kwarto berkantong	-	2.000	-
9	Amplop BKD Kwarto berkantong	150	2.200	330.000
10	Amplop BKD Kwarto berkantong	1.500	2.400	3.600.000
11	Amplop BKD Kwarto berkantong	2.000	2.500	5.000.000
12	Amplop BKD Kwarto	1.900	2.200	4.180.000
13	Amplop GUBERNUR Besar / kabinet	-	2.300	-
14	Amplop GUBERNUR Besar / kabinet	1.000	2.750	2.750.000
15	Amplop GUBERNUR Besar / kabinet	3.000	2.800	8.400.000
16	Amplop GUBERNUR Kecil	-	1.300	-
17	Amplop GUBERNUR Kecil	5.200	1.700	8.840.000
18	Amplop SETDA Besar / kabinet	-	2.250	-
19	Amplop SETDA Besar / kabinet	1.700	2.750	4.675.000
20	Amplop SETDA Besar / kabinet	6.000	2.800	16.800.000
21	Amplop SETDA Kecil	2.700	1.700	4.590.000
22	Blangko Penilaian Kinerja Pegawai (DP.3)	2	325.000	650.000
23	Blangko Kenaikan Gaji Berkala 4ply 8 x 11"	-	1.250.000	-
24	Blangko Format Model DK / SKUMPTK	-	130.000	-
25	Blangko Format Model DK / SKUMPTK	2	148.000	296.000
26	Blangko Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 final	2	64.000	128.000
27	Blangko Pemotongan PPh Pasal 23	1	70.000	70.000
28	Blangko Pertambahan anak	-	145.000	-
29	Blangko Perkawinan pertama	-	145.000	-
30	Blangko Perkawinan Janda / Duda	-	145.000	-
31	Blangko Tanda Bukti Pembayaran (B.9.4)	-	41.000	-
32	Buku Pengadaan Barang (Bend. 20)	-	49.000	-
33	Buku Penerimaan Barang (Bend. 21)	-	49.000	-
34	Buku Pengeluaran Barang (Bend.21.a)	-	49.000	-
35	Buku penilaian kinerja Pegawai	-	100.000	-
36	Buku Agenda Surat Masuk	-	56.000	-
37	Buku Agenda Surat Masuk	13	57.000	741.000
38	Buku Agenda Surat Keluar	13	56.000	728.000
39	Buku Agenda Surat Keluar	15	57.000	855.000
40	Buku Inventaris bend.18	-	49.000	-
41	Buku Kas Umum (BKU) Pengeluaran	15	70.000	1.050.000
42	Buku Kas penerimaan bend.1	9	70.000	630.000
43	Buku Bon Barang NCR	-	25.000	-
44	Buku Bon Barang NCR	9	27.000	243.000
45	Buku Resep Dokter	-	18.000	-
46	Cetak Name Text Kartu Identitas Pegawai	-	30.000	-
47	Cetak Brosur BKD	-	3.000	-
48	Disposisi warna Merah	-	95.000	-
49	Disposisi warna Merah	82	96.000	7.872.000
50	Dos Arsip BKD	190	7.900	1.501.000
51	Dos Arsip BKD	500	38.000	19.000.000

52	Formulir Isian Pegawai (FIP.01)	2	113.000	226.000
53	Formulir Isian Pegawai (FIP.02)	5	113.000	565.000
54	Kertas LJK	-	500.000	-
55	Kertas Catatan Medik	-	145.000	-
56	Kartu Barang (Kuning) bend.22	-	1.500	-
57	Kartu persediaan Barang bend.23 (Putih)	-	1.500	-
58	Kartu hasil pemeriksaan kesehatan	-	450	-
59	Kartu persediaan Barang bend.23 (Biru)	-	1.500	-
60	Kartu persediaan Barang bend.23 (jambon)	-	1.500	-
61	Kartu persediaan Barang bend.23 (hijau)	-	1.500	-
62	KENDALI Surat Masuk	26	13.000	338.000
63	KENDALI Surat Keluar	133	15.000	1.995.000
64	KENDALI Surat Keluar	25	12.000	300.000
65	Kop Surat SETDA	-	125.000	-
66	Kop Surat BKD	1	125.000	125.000
67	Kop Surat GUBERNUR	-	119.000	-
68	Kop Surat Gubernur Logo Garuda Emas	7	250.000	1.750.000
69	Kop Surat Gubernur untuk SK	-	119.000	-
70	Plakat BKD	30	275.000	8.250.000
71	Snelhecter Kertas BKD untuk Arsip	800	3.800	3.040.000
72	Stiker Inventaris Barang	-	1.000	-
73	Surat Setoran Pajak (SSP)	20	80.000	1.600.000
74	Surat Tanda Setoran (STS)	-	70.000	-
75	Surat Keterangan Sakit	-	16.000	-
76	Surat Keterangan Sehat	-	16.000	-
77	Surat Bukti Pengeluaran C5 bend. 22 (B.10.12)	-	42.500	-
78	Surat Bukti Pengeluaran C5 bend. 22 (B.10.12)	-	32.500	-
79	Surat Bukti Pengeluaran C5 bend. 22 (B.10.12)	197	43.000	8.471.000
80	Stopmap BKD Rahasia	1.250	9.000	11.250.000
81	Stopmap Folio Berlogo BKD	2.100	9.000	18.900.000
82	Stopmap kwarto Berlogo BKD	-	5.000	-
83	Stopmap kwarto Berlogo BKD	2.650	6.000	15.900.000
84	Stopmap Folio BATIK	700	7.500	5.250.000
				216.004.000

5.2.1.2. Aset Tetap

Aset Tetap per 31 Desember 2016 sebesar Rp 14.604.765.424,81 turun sebesar 279.863.589,62 atau 1,89 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 14.884.629.014,43 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian mutasi aset tetap terdiri dari :

Saldo Awal	Rp 25.717.144.925
Penambahan	
Belanja Modal	Rp1.108.254.100
Belanja Barang/Jasa	Rp 3.850.000

Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp 139.840.000
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp 1.251.944.100
Berkurang	
Ekstrakontable	Rp 450.000
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp139.840.000
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp 140.290.000
Grand Total	Rp 26.828.799.025

5.2.1.2.1. Tanah

Tanah per 31 Desember 2016 sebesar Rp 6.421.500.000,- tetap tidak ada perubahan dari tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut :

	2016	Bertambah	Berkurang	2015
Tanah	6.421.500.000	0	0	6.421.500.000
Jumlah	6.421.500.000	0	0	6.421.500.000

5.2.1.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 sebesar Rp 11.767.948.725,- naik sebesar Rp 950.055.600 atau 8,7 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 10.817.893.125,- dengan rincian sebagai berikut :

	2016	Bertambah	Berkurang	2015
Alat Berat	810.245.000	116.040.000		694.205.000
Alat Angkut	2.868.244.768			2.868.244.768
Alat Bengkel dan Ukur				
Alat Pertanian dan Peternakan				
Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.704.168.651	799.315.600	450.000	6.946.403.051
Alat Studio dan Komunikasi	328.791.656	151.190.000	116.040.000	252.541.656
Alat Kedokteran	56.498.650			56.498.650

	2016	Bertambah	Berkurang	2015
Alat Laboratorium				
Alat Keamanan	23.800.000	23.800.000		
Jumlah	11.767.948.725	1.090.345.600	140.290.000	10.817.893.125

5.2.1.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 sebesar Rp 7.566.703.700 tetap sesuai saldo per 31 Desember 2015 dengan rincian sebagai berikut :

	2015	Bertambah	Berkurang	2015
Gedung	7.566.703.700	0	0	7.566.703.700
Monumen				
Jumlah	7.566.703.700			7.566.703.700

5.2.1.2.4. Jalan, irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan jaringan per 31 Desember 2016 sebesar Rp 799.998.000 tetap sesuai saldo per 31 Desember 2015 dengan rincian sebagai berikut :

	2016	Bertambah	Berkurang	2015
Jalan dan Jembatan				
Bangunan Air/Irigasi				
Instalasi	799.998.000	0	0	799.998.000
Jaringan				
Jumlah	799.998.000			799.998.000

5.2.1.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2016 sebesar Rp 272.648.600 naik sebesar 145,52 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 111.050.100 dengan rincian sebagai berikut :

	2016	Bertambah	Berkurang	2015
Buku Perpustakaan	22.630.100	2.898.500	0	25.528.600
Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan	88.420.000	158.700.000	0	247.120.000
Hewan, Ternak dan Tanaman				
Jumlah	111.050.100	161.598.500	0	272.648.600

5.2.1.3. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2016 sebesar naik sebesar (Rp 12.224.033.600,1) (Rp 1.391.517.689,6) atau 12,85 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar (Rp 10.832.515.910,5) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Keterangan	2016	2015
1	ALAT-ALAT BESAR	187.015.500	89.566.000
2	ALAT-ALAT ANGKUT	1.954.879.268	1.743.931.493
3	ALAT-ALAT BENGKEL	-	
4	ALAT-ALAT PERTANIAN	-	
5	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	6.248.333.057	5.393.100.842
6	ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI	221.637.754	171.111.422
7	ALAT KEDOKTERAN	52.420.650	49.742.650
8	ALAT LABORATORIUM	-	
9	ALAT KEAMANAN	-	
10	BANGUNAN GEDUNG	3.299.854.672	3.145.170.753
11	BANGUNAN MONUMEN	-	
12	JALAN DAN JEMBATAN	-	
13	BANGUNAN AIR IRIGASI	-	239.892.750
14	INSTALASI	259.892.700	
15	JARINGAN	-	
	JUMLAH	12.224.033.600	10.832.515.910

5.2.1.4. Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2016 sebesar Rp 0 tetap sesuai saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 0 dengan rincian sebagai berikut :

	2016	2015
Aset Dikerjasamakan	0	0
	0	0
	2016	2015
Aset Tak Berwujud	151.539.500	151.539.500
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(151.539.500)	(151.539.500)
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Netto	0	0
	2016	2015
Barang Rusak Berat	253.760.035	253.760.035
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(253.760.035)	(253.760.035)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Netto		
Jumlah Aset Lainnya	0	0

5.2.1.4.1. Aset Tidak Berwujud

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2016 sebesar Rp 151.539.500,- tetap dibandingkan saldo per 31 Desember 2015.

5.2.1.4.2. Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2016 sebesar Rp 151.539.500,- tetap dibandingkan saldo per 31 Desember 2015.

5.2.1.4.3. Barang Rusak Berat

Barang Rusak Berat per 31 Desember 2016 sebesar Rp 253.760.035,- tetap dibandingkan saldo per 31 Desember 2015.

	2016	2015
Alat Besar		
Alat Angkut		
Alat Bengkel		
Alat Pertanian		
Alat Kantor dan Rumah Tangga	247.388.035	247.388.035
Alat Studio dan Komunikasi	6.372.000	6.372.000
Alat Kedokteran		
Alat Laboratorium		
Alat Keamanan		
Gedung		
Monumen		
Jalan dan Jembatan		
Bangunan Air dan Irigasi		
Instalasi		
Jaringan		
Buku Perpustakaan		
Barang Bercork Kebudayaan		
Hewan dan Tumbuhan		
Jumlah	253.760.035	253.760.035

5.2.1.4.4. Penyusutan Barang Rusak Berat

Penyusutan Barang Rusak Berat per 31 Desember 2016 sebesar Rp 253.760.035,- tetap dibandingkan saldo per 31 Desember 2015.

	2016	2015
Alat Besar		
Alat Angkut		

	2016	2015
Alat Bengkel		
Alat Pertanian		
Alat Kantor dan Rumah Tangga	247.388.035	247.388.035
Alat Studio dan Komunikasi	6.372.000	6.372.000
Alat Kedokteran		
Alat Laboratorium		
Alat Keamanan		
Gedung		
Monumen		
Jalan dan Jembatan		
Bangunan Air dan Irigasi		
Instalasi		
Jaringan		
Jumlah	253.760.035	253.760.035

5.2.2. EKUITAS

Total Ekuitas per 31 Desember 2016 sebesar Rp 14.972.512.654,81 turun sebesar Rp 189.546.589,62. atau 1,25 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 15.162.059.244,43.

5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1. PENDAPATAN-LO

Pendapatan yang dimasukkan dalam Laporan Operasional adalah pendapatan yang telah timbul hak pemerintah untuk menagih selama TA. 2016. Pendapatan-LO per 31 Desember 2016 sebesar Rp 735.300.000,- naik sebesar Rp 51.316.000 atau 7,5% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 683.984.000,- dengan rincian sebagai berikut :

	2016	2015
Pendapatan Asli daerah	735.300.000	683.984.000
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah		
Jumlah	735.300.000	683.984.000

5.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah-LO per 31 Desember 2016 sebesar Rp 735.300.000,- naik sebesar Rp 51.316.000 atau 7,5% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 683.984.000,- dengan rincian sebagai berikut:

	2016	2015
Pendapatan Pajak Daerah		

	2016	2015
Pendapatan Retribusi Daerah		
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	735.300.000	683.984.000
Jumlah	735.300.000	683.984.000

5.3.1.1.1. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-Lain PAD yang Sah-LO per 31 Desember 2016 sebesar Rp 735.300.000,- naik sebesar Rp 51.316.000 atau 7,5% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 683.984.000,- dengan rincian sebagai berikut :

	2016	2015
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan		
Pendapatan Bunga		
Tuntutan Ganti Rugi		
Pendapatan Denda keterlambatan		
Pendapatan Denda Pajak		
Pendapatan Denda Retribusi		
Pendapatan dari Pengembalian		
Penerimaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	0	125.984.000
Penerimaan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	735.300.000	558.000.000
Penerimaan dari BLUD		
Penerimaan Lain-Lain		
Jumlah	735.300.000	683.984.000

5.3.2. BEBAN

Belanja yang dimasukkan dalam Laporan Operasional adalah Belanja yang telah diterbitkan dokumen pembayaran yang disahkan oleh pengguna anggaran dan barang telah diterima. Beban per 31 Desember 2016 sebesar Rp 38.747.654.246,62 turun sebesar Rp 15.060.083.255,29 atau 27,99 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 36.664.656.839,- .

5.3.2.1. Beban Operasional

Beban Operasional per 31 Desember 2016 sebesar Rp 38.747.654.246,62 turun sebesar Rp 15.060.083.255,29 atau 27,99 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 36.664.656.839,-

	2016	2015
Beban Pegawai	24.060.516.881	36.664.656.839
Beban Barang & Jasa	13.295.619.676	15.082.483.170
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.391.517.689,62	1.681.727.211,91

	2016	2015
Beban Lainnya		378.870.281
Jumlah	38.747.654.246,62	53.807.737.501,91

5.3.2.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai per 31 Desember 2016 sebesar Rp 24.060.516.881 turun sebesar Rp 12.604.139.958 atau 34,38% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 36.664.656.839,-.

	2016	2015
Beban Pegawai Tidak langsung	21.875.824.381	34.200.420.039
Beban Pegawai Langsung	2.184.692.500	2.464.236.800
Jumlah	24.060.516.881	36.664.656.839

5.3.2.1.2. Beban Barangdan Jasa

Beban Barang dan Jasaper 31 Desember 2016 sebesar Rp 13.295.619.676 turun sebesar Rp 1.786.863.494,- atau 11,85 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 15.082.483.170,-.

	2016	2015
Beban Persediaan	3.604.572.714	3.566.060.543
Beban Jasa	2.731.981.542	3.622.655.165
Beban Pemeliharaan	1.562.682.251	2.992.799.381
Beban Perjalanan Dinas	3.759.608.669	3.643.566.149
Beban Barang & Jasa Lainnya	1.636.774.500	1.257.401.932
Jumlah	13.295.619.676	15.082.483.170

5.3.2.1.3. Beban Penyusutan/Amortisasi Aset

Beban Penyusutan/Amortisasi Asetper 31 Desember 2016 sebesar Rp 1.391.517.689,62 naik sebesar Rp 290.209.522 atau 17,26% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 1.681.727.211,91.

	2016	2015
Beban Penyusutan Aset Tetap	1.391.517.689,62	1.397.659.276,91
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud		284.067.935
Beban Penyusutan Aset tetap Rusak Berat		
Jumlah	1.391.517.689,62	1.681.727.211,91

5.3.2.1.4. Beban Lain-Lain

Beban Lain-Lainper 31 Desember 2016 sebesar Rp 0 turun sebesar Rp 378.870.281,- dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 378.870.281,-.

	2016	2015
Beban Penghapusan Aset	0	378.870.281
Beban Penyisihan Piutang	0	
Beban Diragukan Tertagih Investasi Non Permanen	0	
Beban Hibah Aset Tetap	0	
Jumlah	0	378.870.281

5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Merupakan komponen Laporan Keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir.

NO	URAIAN	2016	2015
1	Ekuitas Awal	15.162.059.244,43	14.128.556.433,75
2	Surplus/Defisit-LO	(38.012.354.246,62)	(53.123.753.501,91)
3	RK-PPKD	37.819.407.177,00	53.248.390.359,00
4	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	3.400.480,00	908.865.953,59
4.1	Koreksi/Penyesuaian Kas	480,00	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas Bendahara Pengeluaran	480,00	
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas Bendahara Penerimaan		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas BLUD	-	
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Setara kas		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas Bendahara Pengeluaran		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas Bendahara Penerimaan	-	
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas BLUD	-	
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Setara kas		
4.2	Koreksi/Penyesuaian Piutang	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Piutang Pajak		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Piutang Retribusi		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Piutang Lainnya		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Piutang Pajak	-	
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Piutang Retribusi		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Piutang Lainnya		
4.3	Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Piutang	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyisihan Piutang		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyisihan Piutang	-	
4.4	Koreksi/Penyesuaian Persediaan	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Persediaan		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Persediaan		
4.5	Koreksi/Penyesuaian Investasi Non Permanen	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Investasi Non Permanen		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang investasi Non Permanen		
4.6	Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Investasi Non Permanen		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyisihan Investasi Non Permanen		

	-	Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyisihan Investasi Non Permanen		
4.7		Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap	3.400.000,00	1.532.895.965,00
	-	Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tetap dari Belanja Barang dan Jasa	3.850.000,00	1.245.206.000,00
	-	Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD	-	-
	-	Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi antar Aset Tetap	139.840.000,00	189.877.000,00
	-	Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi dari Aset Lainnya	-	550.000.000,00
	-	Koreksi/Penyesuaian Tambah Penilaian Aset Tetap	-	-
	-	Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap ke Aset Ekstrakontable	(450.000,00)	(8.550.000,00)
	-	Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD	-	(189.877.000,00)
	-	Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi antar Aset Tetap	(139.840.000,00)	(253.760.035,00)
	-	Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi ke Aset Lainnya	-	-
	-	Koreksi/Penyesuaian Kurang Penilaian Aset Tetap	-	-
4.8		Koreksi/Penyesuaian Penyusutan	-	(310.317.946,41)
	-	Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyusutan	-	(560.774.981,41)
	-	Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyusutan	-	250.457.035,00
4.9		Koreksi/Penyesuaian Aset Lainnya	-	(192.480.465,00)
	-	Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tak Berwujud	-	
		Koreksi/Penyesuaian Tambah Koreksi		103.759.500,00
	-	Koreksi/Penyesuaian Tambah Mutasi dari Aset Tetap	-	
	-	Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklas Pemanfaatan	-	253.760.035,00
	-	Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tak Berwujud	-	
	-	Koreksi/Penyesuaian Kurang Mutasi ke Aset Tetap	-	
	-	Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklas Pemanfaatan	-	(550.000.000,00)
	-	Koreksi/Penyesuaian Kurang Koreksi	-	
4.10		Koreksi/Penyesuaian Amortisasi	-	(121.231.600,00)
	-	Koreksi/Penyesuaian Tambah Amortisasi	-	(121.231.600,00)
	-	Koreksi/Penyesuaian Kurang Amortisasi	-	
4.11		Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Aset Lainnya	-	
	-	Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyusutan	-	
	-	Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyusutan	-	
4.12		Koreksi/Penyesuaian Lain-Lain	-	
	-	Koreksi/Penyesuaian Tambah Lain-Lain	-	
	-	Koreksi/Penyesuaian Kurang Lain-Lain	-	
5	Ekuitas Akhir		14.972.512.654,81	15.162.059.244,43

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Gambaran Umum

Secara historis Badan Kepegawaian Daerah lahir sebagai konsekuensi pelaksanaan Otonomi Daerah dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, di mana dalam salah satu pasalnya mengisyaratkan adanya kewenangan pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah.

Selanjutnya nama lembaga Badan Kepegawaian Daerah sendiri mulai di sebut untuk pertama kalinya dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian pada pasal 34A yang menegaskan :”Untuk kelancaran pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dibentuk Badan Kepegawaian Daerah”.

Berdasar Ketentuan tersebut diatas maka untuk pembentukan lembaga Badan Kepegawaian Daerah diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah telah dilaksanakan penataan organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menempatkan fungsi manajemen kepegawaian yang semula dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian pada Sekretariat Daerah, dialihkan kepada lembaga tersendiri yang melaksanakan fungsi manajemen kepegawaian, yaitu Badan Kepegawaian Daerah.

Oleh karena itu pada tahun 2001 dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 *tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Informasi, Komunikasi dan Kehumasan, Badan Koordinasi Pemb Lintas Kab/Kota Propinsi Jawa Tengah Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Badan Kepegawaiaian Daerah, Badan Pendidikan dan Pelatihan, Badan Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Badan Penanaman Modal, Badan Pengawas, Badan Bimbingan Masal Ketahanan Pangan, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Arsip Daerah, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 27)* dibentuklah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu lembaga perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah, yang menempati kantor di Jalan Stadion Selatan Nomor 1 Semarang.

Sehubungan adanya PP nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 dirubah Menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai lembaga baru yang lahir di era reformasi, Badan Kepegawaian Daerah dengan mengemban amanat sebagai pengelola manajemen kepegawaian daerah, mulai menata diri dengan melakukan penataan dari segi sistem, personil maupun pelayanannya.

Guna memantapkan eksistensi dan arah perjuangan dalam mengemban amanat tersebut Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah menetapkan visi yaitu **“Menjadi Pengelola Manajemen Kepegawaian Yang Profesional dan Unggul ”** sebagai cita-cita yang ingin diwujudkan. Hal ini mengandung arti bahwa setiap personil Badan Kepegawaian Daerah dalam bekerja selalu mengutamakan kepentingan pihak-pihak yang dilayani sesuai tugas tanggung jawab masing-masing dan bahwa tugas yang diemban tersebut merupakan amanah yang wajib dijalankan secara profesional, sehingga dapat terwujud PNS yang Profesional, Bermoral, Netral sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Selanjutnya untuk mewujudkan visinya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah menetapkan misi yang selanjutnya dijabarkan dalam program-program kegiatan setiap tahunnya. Dalam mengemban misinya dan pelaksanaan fungsi dan tugas pokoknya Badan Kepegawaian Daerah berusaha memanfaatkan perkembangan teknologi informatika dan komputer dengan mendayagunakan serta meningkatkan kemampuan personilnya. Hasilnya telah terwujud beberapa program aplikasi komputer untuk pengelolaan data dan penyelesaian administrasi kepegawaian.

Di samping itu sebagai Badan yang membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan manajemen kepegawaian, telah dikembangkan beberapa program kegiatan sebagai upaya peningkatan kualitas layanan dan kualitas manajemen kepegawaian.

6.2 Penyelenggaraan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Sejak Berdirinya hingga sekarang Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh:

1. Widadi, SH	30 Juni 2001	s/d	4 Maret 2006
2. Drs Agus Setianto	4 Maret 2006	s/d	31 Agustus 2011
3. Suko Mardiono, SH, MM	9 September 2011	s/d	29 Januari 2015
4. Drs. Mohamad Arief Irwanto, M.Si	1 Februari 2015	s/d	sekarang

6.3 Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

6.3.1 Misi

Visi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah:

Menjadi Pengelola Manajemen Kepegawaian Daerah Yang Profesional dan Unggul

6.3.2 Misi

1. Perencanaandanpengembanganpegawai yang obyektif dan transparan.
2. Pelaksanaan mutasi kepegawaian yang akurat dan terukur.
3. Peningkatan kualitas pegawai melalui pengukuran kompetensi dan penilaian kinerja.
4. Peningkatan disiplin dan kesejahteraan serta pelaksanaan netralitas pegawai.
5. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian yang akurat dan terintegrasi.
6. Peningkatan tertib administrasi dan layanan prima kepegawaian.

6.4 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 83 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) :

Kedudukan Badan Kepegawaian Daerah sebagai unsur pendukung tugas Gubernur dibidang kepegawaian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, dengan Tugas Pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kepegawaian.

6.4.1 Fungsi Badan Kepegawaian Daerah

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mempunyai fungsi:

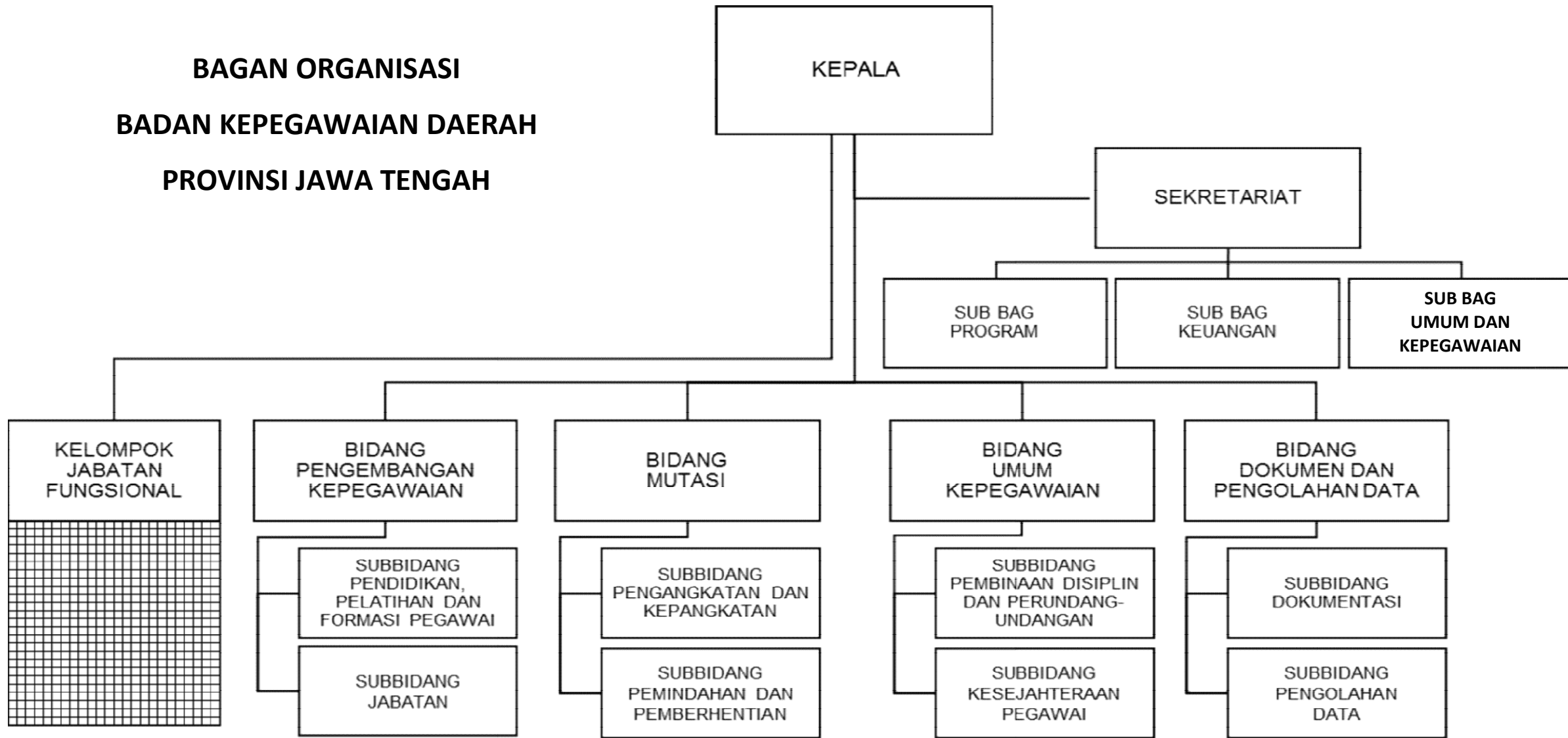
1. Perumusan kebijakan teknis dbidang kepegawaian;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian;
3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, Umum Kepegawaian, dokumen dan pengolahan data Pegawai Negeri sipil lingkup Provinsi dan Kabupaten / Kota ;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kepegawaian;
5. Pelaksanaan Kesekretariatan badan;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya;

6.5 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Badan, dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan yang membawahi tiga sub bagian, dan empat Bidang yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi masing-masing dua Sub Bidang.

Adapun gambar struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

**BAGAN ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**



BAB VII

PENUTUP

Demikian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 ini kami susun untuk dapat memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahannya yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang tersedia serta keberhasilan capaian saat ini untuk meningkatkan kualitas capaian kinerja di tahun yang akan datang, sekaligus sebagai pertanggung jawaban Pengguna Anggaran kepada Gubernur Jawa Tengah.

Daftar Lampiran Tambahan

Daftar lampiran tambahan antara lain meliputi :

1. Lampiran 1.2 Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Cetak SIMDA)
2. Lampiran II Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Cetak SIMDA)
3. Daftar Aset Tetap Tahun Anggaran 2016.
4. Daftar Aset Lainnya Tahun Anggaran 2016.
5. Daftar Dana Bergulir Tahun Anggaran 2016.
6. Berita Acara Stock Opname Tahun Anggaran 2016.
7. Berita Acara Serah Terima Aset Tahun Anggaran 2016.
8. Berita Acara Penghapusan Aset dan Hibah Aset Tahun Anggaran 2016.
9. Lampiran lain terkait dengan penjelasan dalam CaLK (bila ada).

***Catatan dalam penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD**

1. Cover Buku Pertanggungjawaban APBD dapat ditambahkan gambar menurut SKPD.
2. Penyusunan narasi CaLK menggunakan jenis huruf Times New Roman 11.
3. Penyusunan tabel CaLK menggunakan jenis huruf Arial 8.
4. Pencetakan Buku Pertanggungjawaban APBD menggunakan jilid spiral dan diberi kertas pembatas di setiap bab.
5. Penyerahan buku pertanggungjawaban sebanyak 3 (tiga) eksemplar disertai softcopy dalam bentuk CD.